

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aliminsyah dan Padji, 2003, *Istilah Keuangan dan Perbankan*, Jakarta, Erlangga.
- Asikin, Zainal, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya, 2004, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Ibrahim, Jhonny, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Lontoh, Rudhy A, 2001, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, PT Alumni.
- Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, FH. UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media.
- M, Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.
- R. Soeparmono, 1997, *Masalah Sita Jaminan (CB) Dalam Hukum Perdata*, Bandung, CV Mandar Maju.
- Sastrawidjaja, Man S, 2010, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, PT Alumni.
- Shuban, M. Hadi, 2009, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta, Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Rajawali Press.

Suantio, Retno Wulandari, 2005, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek*. Bandung, CV Mandar Maju.

B. Artikel Jurnal

Agustina, Shinta. "Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol 44, No. 4, 2015.

Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3, 2007.

Putra, Agus Antara, I Nyoman Putu Budiarta, dan Desak Gde Dwi Arini, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu di Indonesia", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020.

Sony, Edy. "Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Tenaga Kerja Atas Hutang Harta Pailit", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 3, 2022.

Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2014.

Vranes, Eric. "Lex Specialis, Lex Posteriori –Zur Rechtsnatur der "Konfliktlösungsregeln" Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht", *Heidelberg Journal of International Law*, Vol. 65, No. 2, 2005.

Fence M. Wantu, 2007 "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3, hlm. 395.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Herzeiene Inlandsch Reglement.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1874 Nomor 23).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 375 Tahun 2016).

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 46 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648).

Rechtreglement voor de Buitengewesten.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering.

D. Hasil Penelitian

Harahap, Muhammad Hanafiah, 2023, Kedudukan Hak-Hak Buruh Dalam Proses Kepailitan Pasa Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perbandingannya Dengan Negara Lain, *Tesis*, Universitas Indonesia.

Rahman, Bagus, 2017, Kedudukan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Dalam Harta Pailit (Studi Atas Putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015), *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia.

Rooseno, Artomo, 2008, Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Bagi Debitor Terhadap Pemegang Hak Tanggungan”, *Tesis*, Universitas Diponegoro.

E. Internet

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. “Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja Menurut Sektor dan Jabatan Tahun 2021-2024”.https://satudata.kemnaker.go.id/satudatapublic/2022/04/files/publikasi/1650295641100_2021%2520%2520Buku%2520Perkiraan%2520Kebutuhan%2520TK_Sektor_Jabatan%25202021_2024.pdf diakses pada 30 Januari 2024.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. “Catat! 11 Asas Kepailitan yang Harus Kamu Tahu.” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/catat-11-asas-kepailitan-yang-harus-kamu-tahu-lt63d0e51c80e96> diakses pada 30 Januari 2024.

Wahyuni, Willa. “Mengenal Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis-lt631f21adec18c/?page=1> diakses pada 31 Januari 2024.

F. Lain-lain

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 1975.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor: SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Upah.